



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

UPAYA STRATEGIS PENANGANAN PASCABENCANA ERUPSI GUNUNG LEWOTOB I LAKI-LAKI

Nidya Waras Sayekti
Analisis Legislatif Ahli Madya
nidya.ws@dpr.go.id

Aris Yan Jaya Mendrofa
Analisis Legislatif Ahli Pertama
aris.mendrofa@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengalami erupsi besar sejak awal November 2024 dan membawa dampak signifikan bagi masyarakat sekitar. Letusan yang dimulai pada 3 November 2024 menghasilkan abu vulkanik tebal, hujan pasir, dan lontaran batu pijar. Akibatnya, ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hingga 16 November 2024, tercatat lebih dari 14.000 warga mengungsi yang tersebar di 16 posko yang disediakan oleh pemerintah dan di rumah-rumah penduduk di wilayah Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan radius daerah bahaya sejauh 7 kilometer serta radius area terdampak di sektor barat daya dan barat laut sejauh 9 kilometer dari puncak gunung.

Bencana ini mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan memutus akses logistik akibat jalan yang tertutup pasir dan kerikil di sejumlah wilayah. Erupsi ini juga berdampak pada sektor transportasi udara dan pariwisata. Abu vulkanik menyebabkan 4 bandara di Pulau Flores ditutup, pembatalan 22 penerbangan internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai, dan 30 penerbangan di Bandara Internasional Lombok.

Untuk menangani dampak bencana, pemerintah memberikan bantuan logistik, layanan kesehatan, dan dukungan psikososial bagi para pengungsi. Untuk memperbaiki kondisi, pemerintah juga merencanakan rehabilitasi infrastruktur dan pemulihan ekonomi. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mengerahkan seluruh unit organisasi untuk membantu korban terdampak, memulihkan jalur logistik, dan mendukung penyediaan prasarana air bersih dan sanitasi di lokasi pengungsian. Upaya ini juga melibatkan koordinasi erat dengan pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Sosial, serta TNI dan Polri.

Penanganan difokuskan pada beberapa aspek utama. Salah satunya adalah membuka kembali jalur logistik yang tertutup material vulkanik dan pohon tumbang, terutama pada ruas jalan nasional Waerunu-Larantuka. Jalur ini merupakan akses vital antara Kota Maumere dan Larantuka. Kementerian PU memobilisasi alat berat, termasuk 2 unit *wheel loader*, 3 unit *water tank*, 3 unit *truck crane*, dan 2 unit *dump truck* untuk membersihkan material vulkanik dan memastikan akses kembali normal.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan relokasi rumah bagi para korban bencana. Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengumumkan rencana pembangunan 1.100 rumah bagi warga yang kehilangan tempat tinggal di atas 50 hektare tanah yang disiapkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Rumah yang akan dibangun dirancang menggunakan teknologi tahan gempa, seperti Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dan Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN), untuk memastikan ketahanan bangunan di daerah rawan bencana. Pemerintah juga akan memverifikasi status tanah dan memastikan lokasi rumah tidak

jauh dari tempat kerja dan lahan pertanian, namun tetap aman dari ancaman erupsi. Selain berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sektor swasta sehingga pemerintah diharapkan dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan juga melibatkan peran swasta dalam pembangunan rumah bagi korban bencana.

Atensi DPR

Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, NTT, telah menimbulkan dampak yang luas. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah tanggap darurat, namun masih memerlukan perhatian untuk memastikan pemulihan dan pembangunan kembali wilayah yang terdampak berjalan dengan cepat dan menyeluruh. Komisi V DPR RI perlu mendorong pemerintah, khususnya Kementerian PU agar memastikan penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi di lokasi pengungsian, serta mempercepat rehabilitasi infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak akibat erupsi. Komisi V DPR RI juga perlu mendorong Kementerian PKP berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah korban terdampak erupsi agar dapat direalisasikan tepat waktu dengan kualitas yang baik. Selain itu, Komisi V DPR RI juga perlu mendorong Kementerian PU dan PKP untuk memberdayakan penduduk terdampak bencana dalam pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pascabencana erupsi.

Sumber

antaranews.com, 15 November 2024;
detik.com, 13 dan 16 November 2024;
liputan6.com, 14 November 2024;
Rakyat Merdeka, 13 November 2024; dan
tempo.co, 14, 15, dan 17 November 2024.

Minggu ke-2 November
(11 s.d. 17 November 2024)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024